

SOSIOLOGI KURIKULUM¹
(Analisis Sosiologis Perubahan Kurikulum 2013)
Muhamad Fauzi

A. Pendahuluan

Pendidikan nasional sebagai salah satu sektor pembangunan nasional dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Makna manusia yang berkualitas, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.² Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan, yang diyakini akan menjadi faktor determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa dan negara Indonesia sepanjang jaman. Dari sekian banyak unsur sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Jadi, tidak dapat disangkal lagi bahwa kurikulum yang dikembangkan dengan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi: (1) manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah; dan (2) manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan (3) warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pengembangan

¹ Judul besar makalah ini penulis pinjam dari judul sebuah buku yang ditulis oleh Rakhmat Hidayat berjudul *Pengantar Sosiologi Kurikulum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. I, 2011. Buku ini mengulas pemikiran para tokoh perintis studi kurikulum dan relasinya dengan pergulatan sosial dan kekuasaan.

² Lihat UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 dan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 bab II pasal 3

dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi merupakan salah satu strategi pembangunan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang masih berbasis kompetensi.

B. Rasionalisasi Perubahan Kurikulum

Perubahan kurikulum adalah kegiatan yang sengaja dilakukan apabila salah satu atau beberapa komponen kurikulum dalam waktu tertentu berdasarkan hasil evaluasi perlu diperbaiki atau diubah, terutama pada aspek filosofi dan model pembelajarannya.³ Perubahan kurikulum dilakukan karena adanya keadaan yang tidak memuaskan pada kurikulum masa lalu, sehingga dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada masa akan datang. Perubahan kurikulum pada dasarnya memang dibutuhkan manakala kurikulum yang berlaku (*current curriculum*) berdasarkan hasil evaluasi dipandang sudah tidak efektif dan tidak relevan lagi dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Namun demikian, setiap perubahan mengandung resiko dan konsekuensi tertentu. Apalagi perubahan kurikulum yang berskala nasional memang kerap kali mengundang sejumlah pertanyaan dan perdebatan, mengingat dampaknya yang sangat luas dan berimplikasi jangka panjang.

Secara sosiologis, perubahan kurikulum sangat diperlukan guna memenuhi tuntutan masyarakat agar tidak terjadi kepincangan antara apa yang diajarkan di sekolah dengan realita yang ada di masyarakat yang semakin modern. Jika hal itu (*gap*) terjadi, maka akan sia-sia saja pembelajaran yang dilakukan di sekolah sebab siswa tetap tidak memperoleh pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan bagi kehidupan sehari-hari mereka di masyarakat dan untuk kehidupan mereka di masa depan. Artinya perubahan kurikulum pada tingkat sekolah memang perlu dilakukan secara terus menerus. Dalam hal ini, perubahan tentunya tidak harus dilakukan secara radikal dan menyeluruh, namun bergantung kepada data hasil evaluasi. Mungkin cukup hanya satu atau beberapa aspek saja yang perlu diubah.

³ Lihat Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 38-39. Lihat juga S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 251-252, dan Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan KTSP*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.33-34.

Sepanjang sejarahnya, di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan kurikulum. hingga ada kesan di masyarakat bahwa “ganti menteri, ganti kurikulum”. Coba perhatikan tabel kronologis perkembangan kurikulum di Indonesia berikut ini:

Tahun	Kurikulum	Keterangan
1947	Rencana Pelajaran 1947	<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan. • Istilah kurikulum masih belum digunakan. Sementara istilah yang digunakan adalah Rencana Pelajaran.
1954	Rencana Pelajaran 1954	<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum ini masih sama dengan kurikulum sebelumnya, yaitu Rencana Pelajaran 1947.
1968	Kurikulum 1968	<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum ini merupakan kurikulum terintegrasi pertama di Indonesia. Beberapa mata pelajaran, seperti Sejarah, Ilmu Bumi, dan beberapa cabang ilmu sosial mengalami fusi menjadi Ilmu Pengetahuan Sosial (<i>Social Studies</i>). Beberapa mata pelajaran, seperti Ilmu Hayat, Ilmu Alam, dan sebagainya mengalami fusi menjadi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau yang sekarang sering disebut Sains.
1975	Kurikulum 1975	<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum ini disusun dengan kolom-kolom yang sangat rinci.
1984	Kurikulum 1984	<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975.
1994	Kurikulum 1994	<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1984.
2004	Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004	<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum ini belum sempat diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia. Beberapa sekolah telah dijadikan uji coba dalam rangka proses pengembangan kurikulum ini.
2006	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006	<ul style="list-style-type: none"> • KBK sering disebut sebagai jiwa KTSP, karena KTSP sesungguhnya filosofinya sama dengan KBK. Kurikulum ini dikembangkan oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan).⁴
2013	Kurikulum Tematik-Integrated 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Dari sisi konsep filosofinya kurikulum ini masih berbasis kompetensi, tapi pembelajarannya berbasis ICT dan penekanan pada <i>character building</i>.

⁴ Lihat Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 13-46, Asep Jihad, *Pengembangan Kurikulum Matematika: Tinjauan Teoritis dan Historis*, Multi Presindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 41-61, Suparlan, *Tanya Jawab Pengembangan Kurikulum dan Materi Pembelajaran: Curriculum and Learning Material Development*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. I, 2011, hlm. 86-92

Perekonomian Indonesia sejak tahun 2005 hingga saat ini terus mengalami pertumbuhan meskipun di tengah bayang-bayang resesi dunia (*global economic crisis*). Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Negara-negara ASEAN.⁵ Momentum pertumbuhan ekonomi ini harus terus dijaga dan ditingkatkan. Generasi muda berjiwa wirausaha yang tangguh, kreatif, ulet, jujur, dan mandiri, sangat diperlukan untuk memantapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Generasi seperti ini seharusnya tidak muncul karena hasil seleksi alam, namun karena hasil gembengan pada tiap jenjang satuan pendidikan dengan kurikulum sebagai pengarahnya. Sebagai negara bangsa yang besar dari segi geografis, suku bangsa, potensi ekonomi, dan beragamnya kemajuan pembangunan dari satu daerah ke daerah lain, sekecil apapun ancaman disintegrasi bangsa masih tetap ada. Maka, kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat untuk memajukan jatidiri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai satu entitas bangsa Indonesia.

Dewasa ini, kecenderungan menyelesaikan persoalan dengan kekerasan dan kasus pemaksaan kehendak sering muncul di Indonesia. Kecenderungan ini juga menimpa generasi muda, misalnya pada kasus-kasus perkelahian massal. Walaupun belum ada kajian ilmiah bahwa kekerasan tersebut berhulu dari kurikulum, namun beberapa ahli pendidikan dan tokoh masyarakat menyatakan bahwa salah satu akar masalahnya adalah implementasi kurikulum yang terlalu menekankan aspek pengetahuan dan keterkungkungan peserta didik di ruang belajarnya dengan kegiatan yang kurang menantang peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum perlu direorientasi dan direorganisasi terhadap beban belajar dan kegiatan pembelajaran yang dapat menjawab kebutuhan ini.

Berbagai elemen masyarakat telah memberikan kritikan, komentar, dan saran berkaitan dengan beban belajar siswa, khususnya siswa sekolah dasar. Beban belajar ini bahkan secara kasatmata terwujud pada beratnya beban buku yang harus dibawa ke sekolah. Beban belajar ini salah satunya berhulu dari banyaknya mata pelajaran yang ada di tingkat sekolah dasar. Maka, kurikulum pada tingkat sekolah dasar perlu diarahkan kepada peningkatan 3 (tiga)

⁵ Silakan akses www.presidentri.go.id/index.php/indikator dan penyampaian Agus D.W. Martowardojo, dalam Rapat Paripurna DPR, 31/05/2012.

kemampuan dasar, yakni baca, tulis, dan hitung, dan pembentukan karakter. Berbagai kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, manipulasi, termasuk masih adanya kecurangan di dalam Ujian Nasional menunjukkan mendesaknya upaya menumbuhkan budaya jujur dan antikorupsi melalui kegiatan pembelajaran di dalam satuan pendidikan. Maka, kurikulum harus mampu memandu upaya karakterisasi nilai-nilai kejujuran pada peserta didik.

Pada saat ini, upaya pemenuhan kebutuhan manusia telah menimbulkan berbagai dampak negatif, misalnya pencemaran, semakin berkurangnya sumber air bersih, adanya potensi rawan pangan pada berbagai belahan dunia, dan pemanasan global. Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi generasi muda di masa kini dan di masa yang akan datang. Dengan demikian, kurikulum sudah seharusnya diarahkan untuk membangun kesadaran dan kepedulian generasi muda terhadap lingkungan alam dan menumbuhkan kemampuan untuk merumuskan pemecahan masalah secara kreatif dan inovatif terhadap isu-isu lingkungan dan ketahanan pangan.

Perubahan dan pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Disamping itu, di dalam menghadapi tuntutan perkembangan zaman, dirasa perlu adanya penyempurnaan pola pikir dan penguatan tata kelola kurikulum serta pendalaman dan perluasan materi. Dan hal pembelajaran yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya penguatan proses pembelajaran dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan.

1. Tantangan Internal

Tantangan internal antara lain terkait dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Tantangan internal lainnya terkait dengan faktor perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Terkait dengan tantangan internal pertama, berbagai kegiatan dilaksanakan untuk mengupayakan agar penyelenggaraan pendidikan dapat mencapai ke delapan standar yang telah ditetapkan. Terkait dengan

perkembangan penduduk, saat ini jumlah penduduk Indonesia usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari usia tidak produktif (anak-anak berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas). Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%.

Ini berarti bahwa pada tahun 2020-2035 sumber daya manusia (SDM) Indonesia usia produktif akan melimpah. SDM yang melimpah ini apabila memiliki kompetensi dan keterampilan akan menjadi modal pembangunan yang luar biasa besarnya. Namun apabila tidak memiliki kompetensi dan keterampilan tentunya akan menjadi beban pembangunan. Oleh sebab itu, tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar SDM usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi SDM yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban.

2. Tantangan Eksternal

Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. Tantangan masa depan antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Di era globalisasi juga akan terjadi perubahan-perubahan yang cepat. Dunia akan semakin transparan, terasa sempit, dan seakan tanpa batas. Hubungan komunikasi, informasi, dan transportasi menjadikan satu sama lain menjadi dekat sebagai akibat dari revolusi industri dan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Arus globalisasi juga akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern seperti dapat terlihat di WTO, ASEAN Community, APEC, dan AFTA. Tantangan masa depan juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknoains, serta mutu, investasi dan transformasi pada sektor pendidikan. Keikutsertaan Indonesia di dalam studi International TIMSS (*Trends in International Mathematics and Science Study*) dan PISA (*Program for International Student Assessment*) sejak tahun 1999 juga menunjukkan bahwa

capaian anak-anak Indonesia tidak menggembirakan dalam beberapa kali laporan yang dikeluarkan TIMSS dan PISA yang hanya menduduki peringkat empat besar dari bawah. Penyebab capaian ini antara lain adalah karena banyaknya materi uji yang ditanyakan di TIMSS dan PISA tidak terdapat dalam kurikulum Indonesia.

Kompetensi masa depan yang diperlukan dalam menghadapi arus globalisasi antara lain berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang bertanggungjawab, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, dan kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal. Disamping itu, generasi Indonesia juga harus memiliki minat luas dalam kehidupan, memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya, dan memiliki rasa tanggung-jawab terhadap lingkungan.

Dilihat dari kajian kemajuan pendidikan yang telah dicapai oleh berbagai negara, mutu pendidikan Indonesia masih perlu terus ditingkatkan. Dalam kaitan itu, pendidikan di Indonesia perlu memperhatikan perkembangan pendidikan Negara lain sebagai bahan perbandingan. Hasil riset PISA (*Program for International Student Assessment*), yang memfokuskan pada literasi bacaan, matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam menunjukkan peringkat Indonesia baru bisa menduduki peringkat bawah dari 65 negara. Hasil Riset TIMSS (*Trends in International Mathematics and Science Study*) menunjukkan siswa Indonesia berada pada peringkat amat rendah dalam kemampuan (1) memahami informasi yang kompleks, (2) teori, analisis dan pemecahan masalah, (3) pemakaian alat, prosedur dan pemecahan masalah dan (4) melakukan investigasi. Hasil-hasil ini menunjukkan perlu ada perubahan orientasi kurikulum, dengan tidak membebani peserta didik dengan konten, namun pada aspek kemampuan esensial yang diperlukan semua warga negara untuk berperanserta dalam membangun negaranya pada abad 21.⁶ Tantangan eksternal lainnya berupa fenomena negatif yang mengemuka antara lain terkait dengan masalah perkelahian pelajar, masalah narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam ujian, dan gejolak sosial di masyarakat (*social unrest*).

⁶ Dokumen Kurikulum 2013: Rasional, Kerangka Dasar, dan Struktur Kurikulum, Bahan Sosialisasi & Uji Publik Kurikulum 2013, Balitbang, Kemendikbud, Jakarta, 2013

Di samping beberapa faktor yang telah diuraikan, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi perubahan kurikulum, yaitu sebagai berikut :

1. Kemasyarakatan

Setiap masyarakat memiliki kebutuhan, tuntutan dan aspirasi sendiri-sendiri. Faktor itu harus jadi pertimbangan dalam menyusun kurikulum. Sekolah dan masyarakat adalah dua institusi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Pendidikan dan kurikulum sekolah harus senantiasa relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Bahkan tuntutan dan kemungkinan yang bakal terjadi pada masyarakat dan generasi mendatang harus telah dipertimbangkan oleh pendidikan. Sebab masyarakat senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka pendidikan dan kurikulum senantiasa harus melihat perubahan dan perkembangan itu.

2. Pertumbuhan dan perkembangan siswa

Para ahli pendidikan dan psikologi memandang siswa sebagai manusia potensial yang sedang tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan itu umumnya melalui tahapan-tahapan psikologis yang hampir sama bagi setiap orang. Dalam hal ini, anak memiliki kebutuhan, minat dan kemampuan masing-masing. Faktor-faktor tersebut harus menjadi pertimbangan mendasar dalam penyusunan kurikulum. Kebutuhan siswa meliputi kebutuhan fundamental, kebutuhan sosial dan kebutuhan ruhaniah. Berdasarkan perbedaan dan kesamaan dalam kebutuhan dan minat para siswa, maka kurikulum disusun dengan mempertimbangkan pertumbuhan dan perkembangan siswa.

3. Proses belajar

Kurikulum disusun berdasarkan proses belajar yang terjadi pada diri siswa (*child-centered*). Berbagai pandangan tentang masalah ini telah banyak dikemukakan. Dalam dunia psikologi kita mengenal berbagai aliran (teori-teori belajar) yang memiliki pandangan sendiri-sendiri tentang pendidikan atau proses belajar. Karena setiap aliran itu sama-sama mempunyai kelebihan dan kelemahannya, maka para ahli mencoba menarik berbagai prinsip belajar yang secara umum dapat disepakati bersama. Prinsip-prinsip belajar itulah yang menjadi landasan pokok dalam penyusunan kurikulum sekolah.

4. Perkembangan ipteks

Perkembangan ipteks juga mempengaruhi pengembangan kurikulum, terutama bagi pengembangan kurikulum PAI, misalnya dampak negatif kemajuan teknologi informasi, seperti internet, telepon seluler (*handphone*) yang memuat film-film dan gambar-gambar porno sangat berpengaruh bagi perkembangan moral peserta didik. Dalam hal ini kurikulum PAI harus memuat materi-materi yang dapat menangkal dampak negatif perkembangan ipteks tersebut.

5. *Political will* (kemauan politik pemerintah)⁷

Kemauan politik (*political will*) pemerintah juga mempengaruhi perubahan dan pengembangan kurikulum. Hal ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan politik pemerintah di bidang pendidikan. Contoh pada Era Orde Baru seluruh kurikulum satuan pendidikan wajib memuat nilai-nilai pendidikan pengamalan dan penghayatan Pancasila (P-4). Pada Era Reformasi, kurikulum satuan pendidikan secara tersirat wajib memuat nilai-nilai pendidikan *civic education*, yang memuat nilai-nilai pendidikan demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesetaraan gender.

C. Deskripsi Struktur Kurikulum 2013⁸

Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten/mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten/mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan untuk kurikulum yang akan datang adalah sistem semester sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester.

⁷Hermana Somantrie, *Perekayasaan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pengembangan dan Penilaian)*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1993

⁸Data dan informasi tentang struktur kurikulum 2013 ini dieksplorasi dan dielaborasi dari sumber footnote no.4.

Struktur kurikulum adalah juga gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum mengenai posisi seorang siswa dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan atau jenjang pendidikan. Dalam struktur kurikulum menggambarkan ide kurikulum mengenai posisi belajar seorang siswa yaitu apakah mereka harus menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam struktur ataukah kurikulum memberi kesempatan kepada siswa untuk menentukan berbagai pilihan. Struktur kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan.

1. Struktur Kurikulum SD/MI

Beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama satu semester. Beban belajar di SD/MI kelas I, II, dan III masing-masing 30, 32, 34 sedangkan untuk kelas IV, V, dan VI masing-masing 36 jam setiap minggu. Jam belajar SD/MI adalah 35 menit.

Struktur Kurikulum SD/MI adalah sebagai berikut:

MATA PELAJARAN

ALOKASI WAKTU BELAJAR PER MINGGU

	I	II	III	IV	V	VI
Kelompok A						
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	4	4	4	4	4	4
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	5	5	6	4	4	4
3. Bahasa Indonesia	8	9	10	7	7	7
4. Matematika	5	6	6	6	6	6
5. Ilmu Pengetahuan Alam	-	-	-	3	3	3
6. Ilmu Pengetahuan Sosial	-	-	-	3	3	3
Kelompok B						
1. Seni Budaya dan Prakarya	4	4	4	5	5	5
2. Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan	4	4	4	4	4	4
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu	30	32	34	36	36	36

2. Struktur Kurikulum SMP/MTS

Dalam struktur kurikulum SMP/MTs ada penambahan jam belajar per minggu dari semula 32, 32, dan 32 menjadi 38, 38 dan 38 untuk masing-masing kelas VII, VIII, dan IX. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar di SMP/MTs tetap yaitu 40 menit.

Struktur Kurikulum SMP/MTS adalah sebagai berikut: **MATA PELAJARAN**

	ALOKASI WAKTU BELAJAR PER MINGGU		
	VII	VIII	IX
Kelompok A			
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3. Bahasa Indonesia	6	6	6
4. Matematika	5	5	5
5. Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
6. Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
7. Bahasa Inggris	4	4	4
Kelompok B			
1. Seni Budaya	3	3	3
2. Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	3	3	3
3. Prakarya	2	2	2
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu	38	38	38

3. Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah (SMA/MA/SMK/MAK)

Struktur kurikulum SMA/MA/SMK/MAK terdiri atas kelompok mata pelajaran wajib yang diikuti oleh seluruh peserta didik dan kelompok mata pelajaran peminatan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Adanya kelompok mata pelajaran wajib dan mata pelajaran peminatan dimaksudkan untuk menerapkan prinsip kesamaan antara SMA/MA dan SMK/MAK. Mata pelajaran wajib sebanyak 9 (sembilan) mata pelajaran dengan beban belajar 24 jam per minggu. Kelompok mata pelajaran peminatan SMA/MA terdiri atas 18 jam per minggu untuk kelas X, dan 20 jam per minggu untuk kelas XI dan XII. Kelompok mata pelajaran peminatan SMK/MAK masing-masing 24 jam per kelas. Kelompok mata pelajaran peminatan SMA/MA bersifat akademik, sedangkan untuk SMK/MAK bersifat vokasional. Struktur ini menempatkan prinsip bahwa peserta didik adalah subjek dalam belajar dan mereka memiliki hak untuk memilih sesuai dengan minatnya.

Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah adalah sebagaimana yang tertera di dalam tabel berikut ini:

Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah kelompok mata pelajaran wajib: **MATA PELAJARAN**

	ALOKASI WAKTU BELAJAR PER MINGGU		
	X	XI	XII
Kelompok A (Wajib)			

1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4
4. Matematika	4	4	4
5. Sejarah Indonesia	2	2	2
6. Bahasa Inggris	2	2	2
Kelompok B (Wajib)			
7. Seni Budaya	2	2	2
8. Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	3	3	3
9. Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B per Minggu	24	24	24
Kelompok C (Peminatan)			
Mata Pelajaran Peminatan Akademik (SMA/MA)	18	20	20
Jumlah Jam Pelajaran yang harus ditempuh per Minggu	42	44	44

D. Perubahan Kurikulum Perspektif Sosiologis

Kajian sosiologis memiliki peranan penting dalam mengembangkan kurikulum pendidikan pada masyarakat dan bangsa di muka bumi ini. Suatu kurikulum pada prinsipnya mencerminkan keinginan, cita-cita tertentu, dan kebutuhan masyarakat. Perkembangan zaman yang sangat pesat, tentunya juga akan berdampak pada perkembangan kurikulum pendidikan suatu negara. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan zaman, yang akhirnya juga menyebabkan kurikulum harus dirombak sedemikian rupa agar sesuai dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, perubahan kurikulum sebaiknya melihat keperluan masa depan.

Perubahan sosial yang progresif merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan memaksa dunia pendidikan mengubah kurikulum. Perubahan sosial adalah gejala perubahan dari suatu keadaan sosial tertentu ke suatu keadaan sosial lain, perubahan pada segi struktur masyarakat yang tampak pada pola-pola perilaku dan pola interaksi antar anggota masyarakat. Perubahan dari segi kultural masyarakat seperti nilai-nilai, sikap-sikap, norma-norma social, termasuk perubahan di berbagai tingkat kehidupan manusia, mulai dari tingkat individual, keluarga, dan masyarakat hingga perubahan ke tingkat masyarakat dunia.⁹ Aspek sosiologis juga berkenaan dengan kondisi sosial masyarakat yang sangat beragam, seperti masyarakat industri, pertanian, nelayan, dan sebagainya. Dalam konteks ini, bagi Durkheim fungsi utama pendidikan adalah

⁹ Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan: Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 207-208

menanamkan berbagai sistem moral kepada masyarakat agar tercipta keteraturan dalam masyarakat (*social order*).¹⁰

Asumsi-asumsi sosiologis tersebut dapat dijadikan titik tolak dalam perubahan dan pengembangan kurikulum. Sebab dalam perspektif sosiologi, pendidikan adalah proses mempersiapkan individu agar menjadi warga masyarakat yang diharapkan, pendidikan adalah proses sosialisasi, dan berdasarkan antropologi, pendidikan adalah “enkulturasi” atau kebudayaan. Untuk menjadikan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang diharapkan maka pendidikan memiliki peran penting, karena itu kurikulum harus mampu memfasilitasi peserta didik agar mereka mampu bekerja sama, berinteraksi, menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat dan mampu meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk yang berbudaya. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks inilah anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya, serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia.¹¹

Dalam masyarakat yang cepat mengalami perubahan akibat pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan mempunyai peranan yang lebih penting dalam hubungannya dengan semua aspek masyarakat, seperti demografi, ekonomi, politik, sosial, ideologi, dan spiritual. Pendidikan harus terus menerus melakukan analisis terhadap realitas tuntutan dan kebutuhan masyarakat sehari-hari (*reality oriented education*). Dengan kata lain, pendidikan yang muatannya ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai (termasuk nilai-nilai luhur budaya bangsa) yang diajarkan di sekolah harus sesuai dengan kondisi, tujuan, dan kebutuhan masyarakat.¹² Sebab siswa sebagai makhluk sosial harus mampu beradaptasi dengan lingkungan kehidupan masyarakat dan negaranya.

Pengembangan kurikulum juga penting memperhatikan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, sekolah sangat

¹⁰ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*, Ar-Ruzz Media, Cet. I, 2011, hlm. 95

¹¹ <http://iptekdakhlan.blogspot.com/2012/09/landasan-sosiologis-pengembangan.html>

¹² Baego Ishak, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Teknik*, Yayasan al Ahkam, Ujung Pandang, 1998, hlm. 56.

dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana sekolah berada. Menurut Ivan Illich (2000) akan sangat berbahaya jika kurikulum sekolah tidak memperhatikan perkembangan sosial kemasyarakatan. Sekolah akan cenderung menjadi penjajah dan mengalienasi siswa dari realitas masyarakat dan alam lingkungannya. Akibatnya, siswa menjadi gagap dan bingung berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan kehidupan masyarakat-nya. Sekolah sebaiknya melayani aspirasi masyarakat, memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal. apa saja yang akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebudayaan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹³

Selanjutnya, sistem nilai juga menjadi sangat penting dipahami ketika akan mengembangkan kurikulum sekolah. Semua masyarakat selalu memiliki sistem nilainya sendiri, baik sistem nilai sosial, moral, agama, budaya dan sebagainya. Sistem nilai yang akan diteruskan dan dikembangkan oleh sekolah perlu dirumuskan secara arif dan bijaksana. Masyarakat juga selalu mempunyai sistem nilai yang berbeda, sehingga formulasi sistem nilai yang akan dimasukkan ke dalam kurikulum juga harus dikaji secara komprehensif. Konsep nilai yang berkembang di masyarakat mesti diapresiasi dalam kurikulum agar bangunan kurikulum sekolah tidak mengalienasi siswa dari masyarakat dan sistem nilainya sendiri.

Sekolah berfungsi mempersiapkan anak didiknya agar dapat berperan aktif dalam masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum sebagai alat dan pedoman dalam proses pendidikan di sekolah harus relevan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Dengan demikian, dalam konteks ini sekolah tidak hanya berfungsi untuk mewariskan kebudayaan dan nilai-nilai suatu masyarakat, akan tetapi sekolah juga berfungsi untuk mempersiapkan anak didik untuk hidup dan kehidupannya di masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum bukan hanya berisi nilai-nilai kehidupan suatu masyarakat, akan tetapi bermuatan segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Pendidik di sekolah pada dasarnya bertujuan mendidik anggota masyarakat agar dapat hidup berintegrasi, berinteraksi dan beradaptasi dengan anggota masyarakat lainnya serta meningkatkan kualitas hidupnya sebagai makhluk berbudaya. Hal ini membawa implikasi bahwa kurikulum

¹³ <http://subiantoroaja.blogspot.com/2013/01/kurikulum-dalam-perspektif-filsafat.html>

sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan harus bermuatan kebudayaan yang bersifat umum seperti: nilai-nilai, sikap-sikap, pengetahuan, dan kecakapan.

Saat ini masyarakat sudah mengalami perubahan sangat cepat, progresif, dan kerap kali menunjukkan gejala “disintegratif” (berkurangnya kesetiaan terhadap nilai-nilai umum). Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada sistem nilai, melainkan juga pada pola kehidupan, struktur social, kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Perubahan sosial yang sangat cepat menimbulkan “*cultural lag*” (ketinggalan kebudayaan akibat adanya hambatan-hambatan). Cultural lag ini merupakan sumber masalah-masalah sosial dalam masyarakat.¹⁴

Pendidikan harus mengantisipasi tuntutan kehidupan masyarakat ini sehingga dapat mempersiapkan anak didik untuk hidup wajar sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam konteks inilah kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat. Untuk dapat menjawab tuntutan tersebut bukan hanya pemenuhan dari segi isi kurikulumnya saja, melainkan juga dari segi pendekatan dan strategi pelaksanaannya. Oleh karena itu, guru sebagai pembina dan pelaksana kurikulum dituntut lebih peka mengantisipasi perkembangan masyarakat, agar apa yang diberikan kepada siswa relevan dan berguna bagi kehidupan siswa di masyarakat.

Penerapan teori, prinsip, hukum, dan konsep-konsep yang terdapat dalam semua ilmu pengetahuan yang ada dalam kurikulum, harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sehingga hasil belajar yang dicapai oleh siswa lebih bermakna dalam hidupnya. Pengembangan kurikulum hendaknya memerhatikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan masyarakat. Tyler (1946), Taba (1963), Tanner dan Tanner (1984) menyatakan bahwa tuntutan masyarakat adalah salah satu dasar dalam pengembangan kurikulum. Calhoun, Light, dan Keller (1997) memaparkan tujuh fungsi sosial pendidikan, yaitu :

- 1) Mengajarkan keterampilan
- 2) Mentransmisikan budaya
- 3) Mendorong adaptasi lingkungan

¹⁴ Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, Cet. II, 2010, hlm.46

- 4) Membentuk kedisiplinan
- 5) Mendorong bekerja kelompok
- 6) Meningkatkan perilaku etik
- 7) Memilih bakat dan memberi penghargaan prestasi¹⁵

Pengembangan kurikulum harus ditekankan pada pengembangan individu dan keterkaitannya dengan lingkungan sosial setempat. Sangatlah penting memperhatikan faktor karakteristik masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Salah satu ciri masyarakat adalah selalu berkembang. Perkembangan masyarakat dipengaruhi oleh falsafah hidup, nilai-nilai, IPTEK, dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat menuntut tersedianya proses pendidikan yang relevan. Untuk terciptanya proses pendidikan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat diperlukan kurikulum yang landasan pengembangannya memperhatikan faktor perkembangan masyarakat. Sebab pendidikan merupakan proses sosialisasi, enkulturasi, dan rekonstruksi suatu masyarakat. Pendidikan memiliki hubungan kuat dengan kehidupan social. Pendidikan adalah sebuah *consensus social*.

Kesimpulan

Pendidikan dalam perspektif sosiologi merupakan proses sosialisasi, enkulturasi, dan rekonstruksi suatu masyarakat. Pendidikan adalah sebuah *consensus social*, kesepakatan-kesepakatan sosial. Oleh karena itu, perubahan kurikulum dalam perspektif sosiologis adalah suatu keharusan. Perubahan kurikulum dalam perspektif sosiologis hendaklah mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan nyata hidup dan kehidupan masyarakat (*social needs*). Sebab kondisi, tuntutan dan kebutuhan masyarakat senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Kurikulum harus responsif, akomodatif, adaptif, dan antisipatif terhadap perubahan itu. Perubahan kurikulum harus bermanfaat, terencana, progresif, dan berkelanjutan. Kurikulum memiliki peranan penting dan strategis dalam sistem pendidikan. Sebab itu tidak jarang kurikulum dijadikan sebagai **“alat untuk menitip pesan dan warisan”** penguasa dan kelompok masyarakat tertentu

¹⁵Dadang Sukirman dan Asra, “Landasan Pengembangan Kurikulum”, dalam *Kurikulum dan Pembelajaran*, Tim Pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cet. I, 2011, hlm.38

tentang cita-cita, nilai-nilai, ideologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk cita-cita perubahan masyarakat yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad dkk, *Pengembangan Kurikulum*, Pustaka Setia Bandung, 1997.
- Alberty, Harold, *Reorganizing the High School Curriculum*, D. Appleton Century Company, New York, 1946.
- Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, Cet. II, 2010
- Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum : Teori dan Praktik*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999.
- Abdullah Idi, *Penegembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2011,
- Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan: Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Asep Jihad, *Pengembangan Kurikulum Matematika: Tinjauan Teoritis dan Historis*, Multi Presindo, Yogyakarta, 2008
- Baego Ishak, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Teknik*, Yayasan al Ahkam, Ujung Pandang, 1998,
- Beuchamp, George A., *Curriculum Theory*, The KAGG Pers, Illinois, 1975.
- Beanne J.A, et. Al., *Curriculum Planning and Development*, Massachussetts, 1986.
- Dadang Sukirman dan Asra, "Landasan Pengembangan Kurikulum", dalam *Kurikulum dan Pembelajaran*, Tim Pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cet. I, 2011
- Dokumen *Kurikulum 2013: Rasional, Kerangka Dasar, dan Struktur Kurikulum, Bahan Sosialisasi & Uji Publik Kurikulum 2013*, Balitbang, Kemendikbud, Jakarta, 2013
- David Nunan, *The Learner-Centered Curriculum*, Cambridge University Press, Cambridge, 1988.
- Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989.

- Hamalik, Oemar, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, Rosda Karya, Bandung, 2007. Jakarta.
- Hermana Somantrie, *Perekayasaan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pengembangan dan Penilaian)*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1993
- Nasution, S., *Asas-Asas Pengembangan Kurikulum*, Jemmars, Bandung, 1990
- , *Pengembangan Kurikulum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Rakhmat Hidayat berjudul *Pengantar Sosiologi Kurikulum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. I, 2011.
- Ragan, B. william *Modern Elementary Curriculum*, The Dryden Press, New York, 1955.
- Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Suciati, dkk, *Belajar dan Pembelajaran*, Universitas Terbuka, Depdiknas, Jakarta, 2007.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, 1997.
- Suparlan, *Tanya Jawab Pengembangan Kurikulum dan Materi Pembelajaran: Curriculum and Learning Material Development*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. I, 2011
- Sanjaya, Wina, *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan KTSP*, Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- UU RI. No. 2 tahun 1989, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya*, Sinar Grafika, Jakarta 1993.
- UU RI. No. 20 tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya*, Sinar Grafika, Jakarta 2003.
- Webster, *Webster's New Word Dictionary Of American Language*, College, The World Publishing Company, 1964.
- <http://iptekdakhlan.blogspot.com/2012/09/landasan-sosiologis-pengembangan.html>
- <http://subiantoroaja.blogspot.com/2013/01/kurikulum-dalam-perspektif-filsafat.html>

www.presidentri.go.id/index.php/indikator

<http://www.scribd.com/doc/15072980/Perjalanan-Kurikulum-Di-Indonesia> diakses tanggal 22 Juli 2011 jam 10.00 WIB

<http://fdj-indrakurniawan.blogspot.com/2010/05/langkah-langkah-pengembangan-kurikulum.html> diakses tanggal 22 Juli 2011 jam 11.30 WIB

Hamalik, Oemar, (1994), Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta, Bumi Aksara, hal. 29

Mandalika, J, & Mulyadi, Usman (2004), Dasar-Dasar Kurikulum, Surabaya, Surabaya Intellectual Club (SIC), hal 55.